



Drs. H Edhi Gunawan M Pd  
Kepala Kanwil Kementerian  
Agama DIY

Produk Domestik Bruto (PDB) pertahun. Ekonomi syariah juga mampu menarik investasi asing US\$ 1 miliar serta membuka tidak kurang 127 ribu lapangan kerja.

Industri halal tidak terbatas pada produksi barang konsumsi seperti makanan dan minuman, juga mencakup kosmetik, farmasi, pakaian, sampai sektor jasa seperti keuangan dan pariwisata. Indonesia memiliki potensi untuk mengembangkan sektor industri halal. Pemerintah pun telah mengeluarkan regulasi yang menjadi panduan dalam pembangunan industri halal, yakni UU No. 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH). Untuk mengimplementasikan penyelenggaraan JPH itu dibentuk Badan

## Menyiapkan SDM Andal Industri Halal Melalui Madrasah Aliyah Program Keterampilan

Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama.

Hadimnya BPJPH membawa semangat untuk memberikan layanan kepada masyarakat khususnya dalam hal sertifikasi halal dengan lebih mudah, murah dan akuntabel. Tujuannya agar layanan tersebut bisa diakses berbagai lapisan masyarakat termasuk pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Kemudahan dari sisi regulasi tersebut perlu dibarengi dengan penyediaan sumber daya manusia (SDM) yang bisa mendukung pertumbuhan industri halal di Indonesia.

### Meningkatkan Mutu Lulusan Madrasah Aliyah Vokasi

Madrasah merupakan satu di antara jenis pendidikan yang dijalankan pemerintah seperti tertuang pada UU Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 pasal 17 pada pasal 18 ayat (3) tentang pendidikan menengah disebutkan bahwa dalam bentuknya pendidikan menengah atas terdiri dari (SMA), sekolah menengah kejuruan (SMK), madrasah aliyah (MA), dan madrasah aliyah kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.

Untuk meningkatkan daya saing lulusan, khususnya penguatan dalam bidang keterampilan, Kementerian Agama menerbitkan kebijakan pembentukan madrasah keterampilan (vokasi). Lulusan madrasah diharapkan mampu untuk menguasai *soft skill* dan *hard skill*. Saat ini terdapat sebelas madrasah aliyah negeri dan swasta di DIY yang mendapat mandat dari Kementerian Agama untuk menjalankan madrasah vokasi.

Sebelas Madrasah tersebut adalah MAN 1 Bantul, MAN 2 Bantul, MAN 1 Kulonprogo, MAN 2 Kulonprogo, MAN 3 Kulonprogo, MAN 1 Sleman, MAN 4 Sleman, MAN 5 Sleman, MAN 2 Yogyakarta, MA Ummatan Wasathon Bantul, dan MA Al-Mumtaz Plus Gunungkidul. Selain itu juga terdapat sejumlah madrasah aliyah yang ditunjuk Kantor Wilayah Kementerian Agama DIY untuk menjadi madrasah keterampilan dengan memberikan tambahan 8 jam materi keterampilan dalam satu pekan.

Di antara implementasi madrasah vokasi ialah dengan mengadopsi *teaching factory* (Tefa) yang telah diterapkan pada sekolah menengah kejuruan (SMK). *Teaching Factory* adalah pembelajaran yang memiliki orientasi ke

produksi dan bisnis, sehingga siswa diharapkan mampu menguasai keahlian atau keterampilan, yang dilaksanakan sesuai prosedur dan standar kerja yang sesungguhnya. Desain suasana seperti industri dan melibatkan pihak industri sebagai pihak yang menilai kualitas hasil pendidikan.

*Teaching factory* tersebut kemudian dimodifikasi menjadi *modified teaching factory* (Mo-tefa) agar sesuai dengan sistem pembelajaran di madrasah aliyah. Motefa diharapkan mampu membekali siswa dengan keahlian atau keterampilan sesuai standar kerja di dunia usaha maupun dunia industri agar lulusan madrasah siap untuk terjun ke dunia kerja maupun menciptakan lapangan kerja sendiri. Sebab faktanya banyak lulusan madrasah aliyah tidak bisa melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi dan harus bersaing dengan lulusan SMA/SMK maupun perguruan tinggi untuk mendapatkan pekerjaan.

### Menerapkan Manajemen Halal

Untuk menjawab tantangan minimnya SDM yang menguasai manajemen halal, khususnya dalam bidang produksi barang dan jasa, terdapat empat madrasah di DIY yang kini siap me-

nerapkan manajemen halal. Masing-masing memiliki program keterampilan yang menjadi unggulan, yakni MAN 2 Kulonprogo dalam bidang agribisnis pengolahan hasil pertanian (APHP), MAN 1 Sleman (Tata Boga), MAN 2 Bantul (Tata Busana) dan MAN 2 Yogyakarta (Broadcasting).

Manajemen halal dilakukan sejak pemilihan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, distribusi, penjualan, penyajian produk dan proses lain secara berkelanjutan. Dengan menggandeng BPJPH, madrasah keterampilan di DIY akan mendapat pendampingan dalam penerapan manajemen halal. Di samping itu guru dan tenaga kependidikan keterampilan dilatih menjadi penyalah halal yang bertanggung jawab terhadap proses produk halal (PPH).

Dengan Motefa dan penerapan manajemen halal pada madrasah vokasi diharapkan dapat mengembangkan kemampuan peserta didik tidak terbatas pada sisi akademik, namun juga memiliki *hard skill* yang akan menjadi bekal bagi mereka untuk berwirausaha maupun bekerja. Selain itu juga menghasilkan lulusan yang paham tentang manajemen halal sehingga siap terjun ke industri halal. (\*)-d

## PIHAK PENOLAK SILAKAN 'JUDICIAL REVIEW'

# UU Ciptaker Melenggang ke Setneg

JAKARTA (KR) - Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menyerahkan naskah final Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) ke Presiden Joko Widodo melalui Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg) Pratikno. UU Ciptaker yang diserahkan sesuai yang disampaikan Pimpinan DPR RI, yaitu 812 halaman.

"Saya ke Setneg untuk menyampaikan Draf UU Ciptaker," kata Indra kepada wartawan di Gedung DPR Senayan, Rabu (14/10).

Lebih lanjut Indra menegaskan, naskah draf UU Ciptaker yang diserahkan sama dengan yang disampaikan Pimpinan DPR sebelumnya yakni 812 halaman dan tidak ada perubahan substansi. Pengiriman draf UU Ciptaker itu merujuk pada ketentuan UU No 12 Tahun 2011, yang menyatakan, DPR memiliki waktu selambat-lambatnya tujuh hari menyerahkan UU kepada presiden sejak tanggal persetujuan.

Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin mengatakan, setelah draf final dikirim ke Presiden, publik dapat mengakses draf UU Ciptaker tersebut. Ia mempersilakan pihak-pihak yang keberatan dengan Omnibus Law UU Ciptaker untuk melakukan pengujian (*judicial review*) UU ke MK.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menjelaskan, sejatinya ruh UU Ciptaker adalah untuk menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya bagi masyarakat dan untuk mencapai pe-

merataan. "Tidak benar kalau pemerintah menganakemaskan pengusaha besar atau akan memberikan karpet merah kepada investor asing untuk bisa samaunya masuk ke Indonesia. Sama sekali tidak benar, justru semangat dari Cipta Kerja itu adalah pengertian investasi, investasi dalam negeri," ujarnya saat menjadi pembicara utama dalam Pertemuan Nasional Fasilitas Kesehatan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, kemarin.

Muhadjir mengungkap pengertian investasi itu adalah pelaku usaha domestik terutama yang bergerak di sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Dengan disahkannya UU Ciptaker, pemerintah berupaya memperluas akses bagi para pelaku usaha mikro di Tanah Air khususnya dalam hal kemudahan perizinan, perluasan akses modal, serta pemberian bimbingan.

(Sim/Ati/Imd)-f

## MENOLAK DIKAITKAN DENGAN DEMO ANARKIS

# Penangkapan Tokoh KAMI Dinilai Tendensius

JAKARTA (KR) - Presidium Koalisi Aksi Masyarakat Indonesia (KAMI) menduga telepon seluler (ponsel) sejumlah tokoh KAMI diretas dan disadap dalam beberapa waktu belakangan. Hal itu disampaikan terkait penangkapan sejumlah aktivisnya dalam dua hari terakhir.

"KAMI menegakkan, ada indikasi kuat handphone beberapa tokoh KAMI dalam hari-hari terakhir ini diretas/ dikendalikan pihak tertentu, sehingga besar kemungkinan disadap atau "digandakan" (dikloning)," demikian pernyataan KAMI yang ditandatangani Gatot Nurmantyo, Din Syamsuddin dan Rochmat Wahab, Rabu (14/10).

KAMI mengklaim kejadian serupa sering dialami para aktivis yang kritis terhadap kekuasaan negara, termasuk yang menimpa beberapa tokoh KAMI. Sebagai akibatnya, bukti percakapan yang ada dinilai KAMI sering bersifat artifisial dan absurd. Dalam pernyataan tersebut, KAMI juga mengancam penangkapan polisi atas sejumlah tokohnya. Mereka menilai penangkapan itu tendensius, prematur dan bernuansa framing.

Ormas ini menolak tindakan anarkis dalam unjukrasa kaum buruh, mahasiswa dan pelajar dikaitkan dengan organisasi KAMI. Diakui, KAMI mendukung mogok nasional dan unjukrasa kaum buruh, namun, KAMI menyatakan secara kelembagaan belum ikut serta, kecuali memberi kebebasan kepada para pendukungnya untuk bergabung dan membantu pengunjukrasa atas dasar kemanusiaan.

KAMI meminta Polri membebaskan para tokoh KAMI dari tuduhan dikaitkan dengan penerapan UU ITE yang banyak mengandung pasal-pasal karet dan patut dinilai bertentangan dengan semangat demokrasi dan konstitusi yang memberi kebebasan berbicara dan berpendapat kepada rakyat warga negara.

KAMI menilai, pengumuman yang disampaikan Mabes Polri oleh Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Awi Setiyono tentang penangkapan tersebut mengandung nuansa pembentukan opini (framing). KAMI juga menilai pengumuman itu merupakan generalisasi dengan penisbatan kelembagaan yang bersifat tendensius. (Ful)-d

## BAPPENAS KUNJUNGI NGINGRONG

# Dukung Kelengkapan Fasilitas

WONOSARI (KR) - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Gunungkidul untuk memantau persiapan sektor pariwisata dalam menghadapi Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB), Rabu (14/10). Salah satu lokasi yang dikunjungi adalah Objek wisata Geosite Ngingrong di Kalurahan Mulo Kapanewon Wonosari yang merupakan salah satu situs geopark nasional dan sudah diakui dunia sebagai kawasan Global Geopark Network (GGN) Unesco.

Kunker dipimpin Sekretaris Bappenas Himawan Hariyoga Djojokusumo mewakili Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dan diterima Bupati Gunungkidul Hj Badingah SSo dan General Manager Geosite Ngingrong, Drs Budi Martono MSI.

Sekretaris Bappenas Himawan Hariyoga mengatakan, setiap kawasan geopark memiliki keunikan, seperti di Geosite Formasi Sambipitu Patuk Gunungkidul terdapat fosil biota laut purba yang terpendam selama jutaan tahun. Namun, yang menjadi permasalahan, kawasan

Geopark di Indonesia belum populer dan hal ini terlihat dari angka jumlah kunjungan wisatawan yang masih tertinggal dari negara lain.

Di Malaysia hanya ada satu kawasan GGN, namun per tahun jumlah kunjungan wisata lebih dari 4 juta. Untuk itu, kawasan Gunung Sewu akan dijadikan prioritas pembangunan nasional. "Geosit di Gunungkidul punya karakteristik dan keunikan sendiri, sehingga berhasil mendapat pengakuan dari Unesco dan hal ini tentu merupakan sebuah prestasi," imbuhnya.

Pihaknya meminta pengelola Geopark Gunung Sewu untuk mendata kebutuhan fasilitas di kawasan yang terbentang di sisi selatan Pulau Jawa ini. Data tersebut akan dijadikan rekomendasi Sekretariat Geopark di Bappenas agar nantinya lebih efektif dalam pengembangannya. Jika bisa diprioritaskan ada target yang harus dicapai dan pihak mana saja yang akan digandeng. Harus ada kerjasama dan kolaborasi berbagai pihak, bisa swasta dan BUMN. (Bmp)-f

## BSU TERMIN I HAMPIR SELESAI

# Akhir Oktober Pencairan Termin II

JAKARTA (KR) - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) yang termasuk dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional sudah selesai pada Tahap V atau hampir selesai untuk penerimaan Termin/Gelombang I. Untuk pencairan Tahap I sampai IV telah mencapai 97,37 persen, atau 11.950.300 pekerja.

"Hingga 12 Oktober 2020, subsidi gaji/upah telah tersalurkan kepada 11,9 juta pekerja. Kita terus mendorong agar pihak perbankan dapat mempercepat proses penyalurannya," kata Menaker Ida Fauziyah di Jakarta, Rabu (14/10).

Ida mengatakan, berdasarkan data per 12 Oktober 2020, BSU Termin I untuk Tahap I telah tersalurkan kepada 2.485.687 penerima (99,43 persen), Tahap II 2.981.533 penerima (99,38 persen), Tahap III 3.476.361 penerima (99,32 persen), Tahap IV 2.579.703 penerima (97,20 persen),

dan Tahap V sebanyak 427.016 penerima (69,03 persen).

"Bantuan pemerintah ini merupakan salah satu Program Pemulihan Ekonomi Nasional. Program ini diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat di tengah pandemi Covid-19," kata Menaker.

Pada Tahap V, Kemenaker menerima 578.230 data calon penerima dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek pada 29 September 2020. Namun pada 30 September 2020 yang merupakan tanggal akhir pengumpulan data calon penerima subsidi gaji/upah, pihaknya kembali menerima tambahan data sebanyak 40.358. Dikarenakan jumlahnya yang tidak begitu signifikan, untuk memudahkan pelaporan ke publik, tambahan data tersebut merupakan bagian dari Tahap V, sehingga secara total pada Tahap V terdapat 618.588 data calon penerima BSU.

Subsidi gaji/upah disalurkan me-

lalui dua termin atau dua gelombang pembayaran. Setelah pembayaran Termin I selesai disalurkan untuk lima tahap, Kemenaker akan melakukan evaluasi sebelum pembayaran Termin II disalurkan.

"Kami targetkan Termin II mulai disalurkan pada akhir Oktober 2020 atau paling lambat penyalurannya akan dimulai awal November 2020 nanti," jelas Ida.

Dengan anggaran mencapai Rp 37,7 triliun, Program BSU ditargetkan untuk 15,7 juta pekerja yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan (per 30 Juni 2020). Namun, hingga batas akhir penyerahan data penerima, data yang dikumpulkan dan diserahkan BPJS Ketenagakerjaan hanya mencapai 12.272.731 pekerja/buruh.

"Sisa anggaran diserahkan kepada Kantor Bendahara Negara. Rencana-nya, akan disalurkan untuk subsidi gaji/upah bagi guru honorer dan tenaga pendidik," kata Menaker. (Sim)-f

## PSSI DIY SIAPKAN PROGRAM SAAT PANDEMI

# Bangun Kembali Prestasi Sepakbola

YOGYA (KR) - Pandemi Covid-19 yang tengah melanda dunia, termasuk Indonesia saat ini, sangat mempengaruhi pelaksanaan kegiatan-kegiatan olahraga. Tak terkecuali, sepakbola yang sejumlah agendanya, termasuk kompetisi tingkat nasional harus terhenti meski menjadi olahraga paling favorit di negeri ini.

Kompetisi profesional seperti Liga 1 dan Liga 2 yang sempat berlangsung beberapa pertandingan, akhirnya harus dihentikan dan belum didapat kepastian kapan akan digulirkan lagi. Tak hanya kegiatan sepakbola profesional, sejumlah agenda sepakbola amatir di daerah, juga harus terhenti dan bahkan batal digulirkan akibat pandemi ini.

Ketua Asosiasi Provinsi (Asprov) PSSI DIY, Ahmad Syaqui Soeratno dalam pembincangan Editorial Harian Kedaulatan Rakyat bersama Redaktur Pelaksana Primaswolo Sudjono dan disiarkan dalam channel YouTube Kedaulatan Rakyat TV, Rabu (14/10) mengatakan, pandemi Covid-19 secara signifikan sangat mempengaruhi perjalanan sepakbola di Indonesia. Pasalnya, dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat, jelas akan berpengaruh langsung pada kegiatan di lapangan.



Ahmad Syaqui Soeratno

"Secara signifikan jelas mempengaruhi perjalanan kegiatan sepakbola saat ini, khususnya kegiatan yang di lapangan. Karena penerapan protokol kesehatan, mengingat sifat virusnya yang mudah menyebar. Itu memunculkan kebijakan kehati-hatian untuk mencegahnya baik itu dari pemerintah, PSSI, kepolisian, untuk dipikirkan bersama," jelasnya.

Bagi Asprov PSSI DIY, pandemi Covid-19 secara langsung berdampak pada pembatalan beberapa kegiatan. Dua kegiatan yang awalnya disiapkan untuk dilaksanakan pada tahun 2020 ini, yakni Piala Asprov dan kompetisi U-16, terpaksa urung dilaksanakan dan kemungkinan baru bisa digulirkan pada tahun 2021 mendatang.

"Piala Asprov ini dulu pernah ada, tapi terhenti dan rencananya tahun 2020 ini akan digulirkan lagi. Tapi karena ada pandemi, ajang yang akan mempertemukan juara-juara hasil kompetisi lokal masing-masing Askab dan Askot se-DIY ini terpaksa tidak bisa kami jalankan. Termasuk U-16-nya. Padahal, ajang itu rencananya akan kami coba *connecting*-kan ke tim profesional yang ada di DIY," jelasnya. (Hit)-d

## Serangan ..... Sambungan hal 1

untuk memberikan jaminan keamanan data dan informasi di DIY. JogjaProv CSIRT merupakan tim gabungan lintas instansi pemerintah di DIY yang didukung BSSN. Kolaborasi ini menunjukkan semangat gotong royong dan sinergi instansi pemerintah di DIY dengan instansi vertikal.

"Saya ucapkan selamat mengabdikan untuk JogjaProv CSIRT. Supaya komitmen untuk memberikan jaminan keamanan data dan informasi. Saya minta mereka bisa bekerja dengan cerdas, ikhlas dan bekerja sampai tuntas untuk keamanan data serta informasi pemerintah dan masyarakat di DIY," kata Sultan HB X di Kepatihan Yogyakarta, Rabu (14/10), menanggapi peluncuran JogjaProv CSIRT.

Dijelaskan, pembangunan sarana dan prasarana Jogja Smart Province menjadi salah satu program prioritas pembangunan di DIY sebagaimana tercantum dalam Keputusan Gubernur DIY Nomor 163/KEP/2017 tentang Program Prioritas Pembangunan. Salah satu sarana untuk mewujudkan Jogja Smart Province tersebut adalah dibentuknya JogjaProv CSIRT oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) DIY yang diluncurkan di Royal Ambarukmo Yogyakarta, Rabu (14/10).

Kepala BSSN Hinsa Siburian dalam sambutan virtualnya mendukung dan mengapresiasi Pemda DIY beserta Diskominfo DIY atas pembentukan dan peresmian JogjaProv CSIRT. "BSSN mendeteksi lebih dari 410,4 juta serangan siber sejak Januari hingga September 2020 ini," katanya.

Kepala Diskominfo DIY Rony Primanto Hari mengungkapkan, serangan siber kepada Pemda DIY tersebut bermacam-macam baik berupa serangan virus, penyusupan, web defacement (perusakan website), hingga serangan malware yang paling banyak. Namun pihaknya berhasil menangkal dan mengatasi berbagai serangan siber tersebut.

"Kehadiran JogjaProv CSIRT semakin meningkatkan pengamanan karena kita bisa mengamankan perangkat dan menggunakan aplikasi atau software," ungkapnya. (Ira/Ria)-d

## OPD ..... Sambungan hal 1

Sekda Kulonprogo Ir RM Astungkoro MHum mengatakan, Kebangkitan Ekonomi Untuk Kulonprogo Maju ini dilatarbelakangi adanya Yogyakarta International Airport (YIA) yang diharapkan memacu pertumbuhan ekonomi dan membuka peluang usaha bagi masyarakat.

Pada masa pandemi Covid-19 ini, Kulonprogo sudah siap memasuki era tatanan kehidupan baru, siap bangkit dari melemahnya sektor usaha yang berdampak pada perekonomian masyarakat. "Masyarakat harus berpartisipasi aktif dengan memanfaatkan peluang yang muncul dari adanya bandara, sehingga tercipta kegiatan ekonomi usaha barang dan jasa," ujar Astungkoro. (Wid/Rul)-d

## Doni: ..... Sambungan hal 1

Menurut Doni, pada praktiknya menjaga jarak dan menghindari kerumunan hal yang masih sulit dilakukan. Hal itu banyak terjadi di beberapa daerah. Karena itu diperlukan upaya kolektif dalam menegakkan 3M tersebut. "Yang berisiko adalah jika tanpa diketahui dia adalah *carrier* atau pembawa virus. Inilah yang berbahaya," jelas Doni.

Karena itu, menurut Doni, harus disadari bahwa setiap saat setiap detik potensi penularan selalu ada, disiplin adalah harga mati. "Sedikit saja kita lengah, kita abai dengan protokol kesehatan, maka kita akan mudah terpapar," tambahnya.

Dalam hal ini, setiap wilayah yang telah memiliki penderita atau pasien Covid-19 menjadi wilayah yang tidak lagi aman. Oleh sebab itu, kesadaran masyarakat akan bahaya Covid-19 dan pemahaman bahwa penyakit yang menyerang sistem pernapasan itu benar-benar nyata dan bukan rekayasa. "Covid-19 ini nyata, bukan rekayasa, apalagi konspirasi," tegasnya.

Doni mengingatkan agar masyarakat di setiap daerah meningkatkan kesadaran akan pentingnya memutus rantai penyebaran Covid-19. (Ati)-d